



**SALINAN**

PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERAIRAN  
DAN PESISIR PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON  
KECAMATAN SUMUR TAHUN 2021-2026

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147.331/Kep. 79-Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pandeglang;
  3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.317-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pandeglang;
  4. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147.331/Kep. 79-Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERAIRAN DAN PESISIR PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON KECAMATAN SUMUR TAHUN 2021-2026.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa Rancapinang, Tugu, Cibadak, dan Kramatjaya.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Kawasan perdesaan dimaksud adalah kawasan perdesaan Perairan dan Pesisir Ratu Badak Jaya Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten/kota.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
10. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
11. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di lokasi Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga TNUK di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi, serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RPKP di susun dengan sistematika sebagai berikut:
  - I. PENDAHULUAN
  - II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
  - III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN
  - IV. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN
  - V. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN
  - VI. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
  - VII. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
  - VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYUSUNAN RPKP  
Pasal 4

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dibantu pihak ketiga (Pendamping Kawasan Perdesaan), melibatkan tokoh masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), Word Wild Fund (WWF), dan lembaga non pemerintah lainnya.
2. RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).
3. RPKP mengacu pada dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V  
KELEMBAGAAN  
Pasal 5

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan Perairan dan Pesisir Penyangga TNUK di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang 2021-2026 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
2. TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
  - b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
  - c. melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati.
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten Pandeglang melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan, yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD dan RKPDesa, sesuai dengan rencana dalam RPKP.
- (3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 7

- (1) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Penyangga TNUK di Kecamatan Cimanggu dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau BUM Desa bersama dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Penyangga TNUK di Kecamatan Cimanggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Mei 2021  
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN PERAIRAN DAN PESISIR  
PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG  
KULON KECAMATAN SUMUR TAHUN  
2021-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.4 Kedudukan RPKP .....	8
II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI .....	11
2.1. Pendekatan .....	11
2.2. Metodologi .....	12
2.2.1 Kerangka Berpikir .....	12
2.2.2 Jenis dan Sumber Data .....	13
2.2.3 Analisis Data .....	14
III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN .....	15
3.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif .....	15
3.1.1 Wilayah Administrasi .....	15
3.1.2 Kondisi Geografis .....	19
3.1.3 Hidrologi .....	19
3.1.4 Geologi .....	24
3.2 Fisik Dasar .....	25
3.2.1 Iklim .....	25
3.2.2 Topografi .....	27
3.2.3 Jenis Tanah .....	28
3.2.4 Penggunaan Lahan .....	28
3.2.5 Kebencanaan .....	32
3.3 Kependudukan .....	33
3.4 Perekonomian Wilayah .....	37
3.5 Kondisi Infrastruktur .....	45
3.5.1 Fasilitas Perhubungan .....	45
3.5.2 Air Bersih dan Sanitasi .....	51
3.5.3 Jaringan Energi Listrik .....	55

3.6	Potensi Wilayah .....	56
IV.	GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN .....	59
4.1	Penetapan dan Delineasi Kawasan Perdesaan .....	59
4.2	Fisik Lingkungan .....	62
4.2.1	Topografi .....	62
4.2.2	Jenis Tanah .....	63
4.2.3	Penggunaan Lahan .....	63
4.2.4	Kebencanaan .....	63
4.3	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan .....	64
4.4	Produk Pendukung Kawasan Perdesaan .....	66
4.5	Kependudukan dan Sosial Budaya .....	67
4.5.1	Laju Pertumbuhan Penduduk .....	67
4.5.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin...	67
4.5.3	Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk .....	69
4.5.4	Distribusi dan Kepadatan Penduduk.....	69
4.5.5	Tingkat Pendidikan Penduduk.....	70
4.5.6	Penduduk Berdasarkan Golongan Usia .....	71
4.5.7	Mata Pencaharian .....	72
4.5.8	Tenaga Kerja dan Pengangguran .....	73
4.6	Perekonomian .....	74
4.6.1	Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/ Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan .....	74
4.6.2	Kondisi Kemiskinan .....	74
4.7	Modal Sosial dan Budaya .....	75
4.8	Sarana dan Prasarana .....	77
4.8.1	Sarana dan Prasarana Transportasi .....	77
4.8.2	Jaringan Telekomunikasi dan Internet .....	81
4.8.3	Jaringan Energi .....	82
4.8.4	Jaringan Air Bersih .....	82
4.8.5	Jaringan Irigasi .....	82
4.8.6	Persampahan .....	83
4.8.7	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi .....	84
4.8.8	Sarana Pendidikan .....	84
4.8.9	Sarana Kesehatan.....	88
4.8.10	Sarana Ekonomi .....	89
4.8.11	Sarana Pendukung Prukades .....	89
4.9	Kelembagaan .....	90
V.	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN .....	92
5.1	Tinjauan Kebijakan .....	92
5.1.1	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 .....	92
5.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2016-2021 .....	94

5.1.3	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.....	95
5.1.4	Posisi Kawasan Perdesaan dalam Konstelasi Regional dan Nasional .....	96
5.2	Konsep Pengembangan Kawasan .....	97
5.2.1	Tema Pengembangan Kawasan .....	97
5.2.2	Hulu Hilir Pengembangan Kawasan .....	97
5.2.3	Pusat Produksi dan Pengolahan .....	98
5.2.4	Pusat Pemasaran .....	102
5.3	Pengembangan Jejaring Kawasan Perdesaan .....	102
VI.	KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM .....	104
6.1	Potensi dan Permasalahan .....	104
6.2	Isu Strategis .....	106
6.4.1	Isu Internal .....	106
6.4.2	Isu Eksternal .....	108
6.3	Tujuan dan Sasaran .....	109
6.4	Visi dan Misi .....	111
6.4.1	Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	111
6.4.2	Misi Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	111
6.5	Strategi dan Arah Kebijakan .....	102
6.6	<i>Site Plan</i> Pusat-Pusat Kegiatan .....	173
VII.	NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN .....	174
7.1	Produk Barang dan Jasa .....	174
7.2	Penyerapan Tenaga Kerja .....	175
7.3	Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan ....	175
VIII.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	176
5.1	Kesimpulan .....	176
5.2	Rekomendasi .....	178

## LAMPIRAN

IRNA NARULITA,

Cap/Ttd

BUPATI PANDEGLANG